BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilihat dari beberapa tahun belakangan ini kekerasan terhadap perempuan dan anak masih saja terjadi meski berdasarkan catatan akhir tahun kepolisian jumlah kejahatan dari tahun 2016 dengan jumlah kasus sebanyak 380.826 dan pada 2017 yakni turun 23% berada di angka 291.748.(Sumber:http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/13/p2halj423-kejahatan-terhadap-anak-dan-perempuan-jadi-fokus-polri diakses pada 16 Maret 2018 pukul 3:05pm). Meski berdasarkan data tersebut telah terjadi penurunan namun, perlindungan terhadap perempuan dan anak sangat penting, mengingat golongan ini kerap dinilai lemah yang menjadikan mereka rentan sebagai sasaran tindak kejahatan.

Untuk melindungi perempuan dan anak dari masalah tersebut, pihak Kepolisian Republik Indonesia membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada tahun 1998 dan masih ada sampai sekarang. Unit PPA ini juga terdapat pada Polres Tangerang Selatan yang mana laporan terkait tindak kriminalitas pada perempuan dan anak di wilayah Tangerang Selatan diterima dan diproses di unit ini.

Berdasarkan pada data laporan di unit PPA Polres Tangsel di tahun 2017 telah terjadi lebih kurang 140 kasus tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak, namun dalam laporan tersebut tidak terdapat

penjelasan status mengenai ada tidaknya langkah lanjutan dari pihak kepolisian dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Selain itu dalam data laporan tidak terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelapor sebagai bukti bahwa laporan tersebut benar, didalam data laporan hanya tercantum nama pelapor, korban dan terlapor. Serta dalam data laporan unit PPA tidak memuat tentang klasifikasi dari kasus-kasus tersebut, hal ini bertolak belakang pada saat dilakukan wawancara terhadap pihak PPA. Pihak PPA menyatakan bahwa adanya pengelompokan kasus biasa dan luar biasa, hal ini berdasarkan kepada akibat yang ditimbulkan. Sebagai contoh dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dalam kasus biasa hal yang ditimbulkan adalah adalah luka ringan dan korban hanya 1 orang, sedangkan untuk kasus luar biasa yakni yang menimbulkan luka berat atau kematian dan korban lebih dari 1 orang.

Selain itu masalah lain saat ini adalah pengelolaan data laporan pada unit PPA Polres Tangerang Selatan yang hanya berupa catatan pada buku, yang mana memerlukan waktu untuk mencari data tersebut, karena data berupa arsip yang disimpan dalam lemari *file* kabinet. Dengan dilihat dari masalah-masalah yang telah disebutkan diatas, Polres Tangerang Selatan memerlukan suatu sistem informasi yang berguna dalam perbaikan pengelolaan data laporan. maka penulis berkeinginan untuk menjadikannya topik dalam penelitian ini, dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Data Laporan Polisi Pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Polres Tangerang Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Identifikasi masalah yang dilakukan, merumuskan permasalahan yang ada untuk dijadikan titik tolak pembahasan dan penulisan penelitian ini. Permasalahan yang akan dibahas adalah, "Bagaimana Membangun Sistem Informasi Pengelolaan Data Laporan Pada Bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Polres Tangerang Selatan?".

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan di dalam penelitian ini untuk membuat Sistem Informasi Pengelolaan Data Laporan Pada Bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Polres Tangerang Selatan yang dapat membantu mengatasi permasalahan pengelolaan data laporan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan didapat dari penelitian skripsi ini adalah:

a. Membantu dalam mengelola, mengidentifikasi dan mencari data laporan dalam proses penanganan di unit PPA Polres Tangerang Selatan.

b. Pengarsipan dokumen dilakukan secara elektronik atau *softcopy* sehingga meminimalkan penggunaan kertas.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

D. Ruang Lingkup

Agar fokus penelitian tidak meluas, maka penelitian ini adalah menyangkut pengelolaan data laporan di unit PPA pada Polres Tangerang Selatan, yang berdasarkan data laporan unit PPA pada tahun 2017, pengolahan data laporan hanya sampai pada unit PPA tidak meluas kedalam penyidikan, memperbaiki sistem pelaporan dengan mencantumkan NIK pelapor, mengklasifikasikan jenis kasus sebanyak 14 jenis, serta penerapannya menggunakan metode pengarsipan dengan sistem nomor.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA